

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023**



**BREBES, 15 JANUARI 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang..

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Brebes, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES



**Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum .....	1
C. Isu Strategis .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Perencanaan Strategis .....	12
B. Program dan Kegiatan .....	15
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	18
C. Perjanjian Kinerja (PK) 2023 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja .....	30
<b>Lampiran – Lampiran</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan di Bidang Perhubungan selama Tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Brebes Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang berkelanjutan.

### **B. Gambaran Umum**

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan

prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang berkeselamatan.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

### **2. Struktur Organisasi**

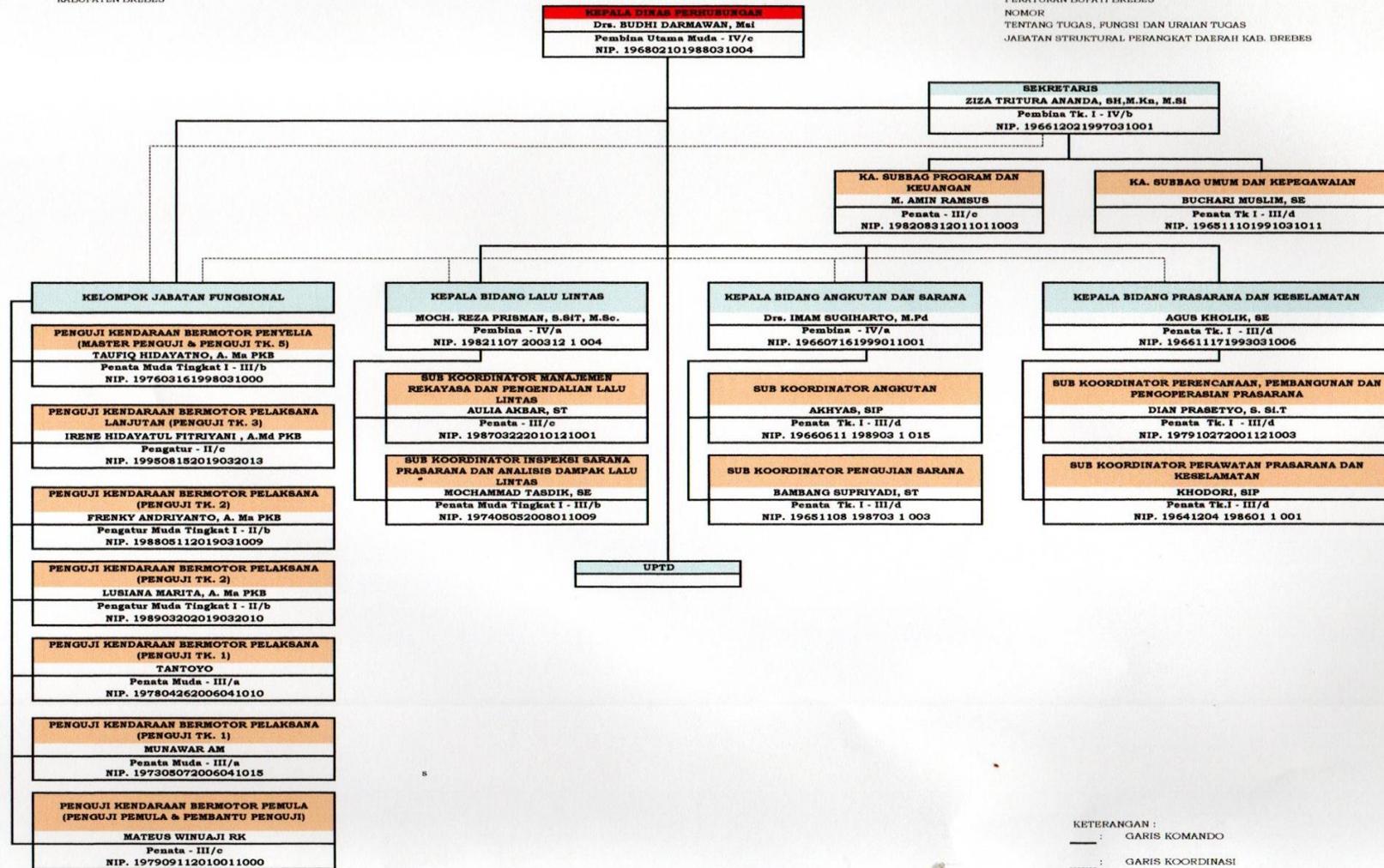
Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2019 dan sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dengan Unsur-unsur Organisasi terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas
  - 2) Sub Bidang Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas
- d) Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri dari;
  - 1) Sub Bidang Angkutan
  - 2) Sub Bidang Pengujian Sarana
- e) Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari;
  - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana
  - 2) Sub Bidang Perawatan Prasarana dan Keselamatan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Unit Pelaksana Teknis

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes seperti gambar di bawah ini :



KETERANGAN :  
: GARIS KOMANDO  
: GARIS KOORDINASI

Gambar 1.1

### 3. Sumber Daya

#### 3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 54 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 2 orang Kepala Sub Bidang.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Sub Bidang dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

##### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bervariasi mulai dari SD sampai S.2 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 1.1**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	3	3	-
2	S1	22	19	3
3	DIV	2	1	1
4	DIII	9	7	2

5	DII	3	2	1
6	SLTA	13	12	1
7	SLTP	-	-	-
8	SD	2	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>44</b>	<b>8</b>

**b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :**

**Tabel 1.2**

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	2	2	
2	II	23	19	4
3	III	24	21	3
4	IV	5	5	-
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>47</b>	<b>7</b>

**c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :**

**Tabel 1.3**

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	-	-	-
3	III	1	1	-
4	IV	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### 3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 1.4

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Lap Top	7	B
2	P.C Unit	2	B
3	Printer	8	B
4	Hard Disk	1	B
5	Mesin Gerinda Tangan Listrik	2	B
6	LCD Projector / Infocus	1	B
7	Handy Talky (HT)	5	B
8	A.C. Split	2	B
9	Senter, Under Water Kinetic	4	B
10	Bangunan Penerangan Jalan	214	B
11	Bangunan Gedung Terminal Banjarharjo	1	B
12	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	B
13	Card Reader (Peralatan Mainframe)	4	B
14	Gergaji	2	B
15	Mesin Gergaji	2	B
16	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	2	B
17	Tang Kombinasi	6	B
18	Tang Potong	4	B
19	Kunci Pas	6	B
20	Toolkit Perbengkelan	2	B
21	Kunci L	2	B

22	Drei Biasa (Obeng)	5	B
23	Rambu-Rambu Petunjuk/Penuntun	46	B
24	Rambu-Rambu Peringatan	14	B
25	Rambu-Rambu Larangan	9	B

### C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Dinas Perhubungan terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Dalam proses pelaporan pekerjaan sangat sulit untuk mendapat progress report secara real-time dari masing-masing pengampu kegiatan di tiap Bidang. Hal ini disebabkan karena kontrol yang sangat lemah dari masing-masing seksi kepada pelaksana kegiatan baik untuk kegiatan yang sifatnya Penyedia maupun yang sifatnya swakelola. Hal ini menyulitkan sehingga dalam membuat laporan bulanan terkadang capaian realisasi fisik tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun capaian realisasi keuangan dapat diketahui dari catatan keuangan.
- 2) Kegiatan yang berjalan terkadang tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesulitan manakala terjadi penumpukan penyerapan APBD pada triwulan akhir, sehingga banyak terjadi penumpukan pekerjaan.
- 3) Pendataan terhadap aset Dinas Perhubungan secara utuh dan pengarsipan kepegawaian dalam bentuk pengolahan data secara elektronik masih belum dapat diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kinerja tidak efisien dari segi waktu, karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga aksesibilitas terhadap data belum optimal.

- 4) Belum adanya sistem pengolahan data secara elektronik untuk mengarsip data kepemilikan dan rekomendasi perizinan angkutan umum, sehingga pelayanan terhadap pemberian izin insidental dan rekomendasi perpanjangan trayek sampai dengan verifikasi perizinan harus dilakukan secara manual dan sangat tidak efisien dari segi waktu.
- 5) Kondisi terminal angkutan umum yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas Perhubungan juga belum representatif untuk melayani masyarakat, dikarenakan kondisinya belum memenuhi standar Terminal yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan.
- 6) Masih kurangnya ketersediaan angkutan penyeberangan, sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes akan ketersediaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan terhadap anggaran dan kekurangan jumlah SDM untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan.
- 7) Bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum memiliki sistem yang terkomputerisasi dengan baik, sehingga antara proses uji, proses administrasi uji dan proses verifikasi perizinan terkait proses pengujian kendaraan bermotor belum terpadu, masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan ketika dibutuhkan pelayanan uji kendaraan yang cepat dan pelaporan data dalam waktu singkat.
- 8) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perhubungan Kabupaten Brebes.
- 9) Alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah berumur lebih dari 15 Tahun sehingga perlu pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk memudahkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang akan uji berkala kendaraan bermotor.
- 10) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas seperti terminal, dermaga, penyeberangan, penyediaan lampu penerangan

jalan, halte, rambu – rambu sungai, rambu – rambu lalu lintas, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sarana angkutan penyeberangan sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan terhadap anggaran dan kekurangan jumlah SDM untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2022

##### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV Penutup.**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

#### **a. Visi Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 :**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Brebes 2017 - 2022 merupakan perencanaan jangka menengah Perhubungan Kabupaten Brebes yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan

peran yang diamanahkan. Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Brebes yaitu :

**“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”**

**b. Misi :**

Visi Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2017 - 2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial;

**c. Tujuan dan Saran**

**Tujuan :**

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: Terciptanya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

**Sasaran :**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yaitu : Meningkatnya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

**d. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja**

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Brebes dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	2.2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan
		2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
			2. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi
			3. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan

## B. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal – hal yang menjadi landasan penetapan program dan kegiatan adalah :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

	SKPD
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan Program ini adalah :

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan

	Angkutan Jalan (LLAJ)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi , Audit dan Pemantauan

	Terminal
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2023 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

#### **D. Perjanjian Kinerja (PK) 2023**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, LKjIP Tahun 2023 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes telah melakukan 2 program, 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp. 22.250.066.424,- (Dua Puluh Dua Milyard Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	81,50 %
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,70 Skor
		2. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	64,00 %
		3. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	53,00 %

Tabel 3.2

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.314.361.793	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.935.704.631	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>22.250.066.424</b>	

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target indikator utama kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori
1	≥ 100	Sangat Baik
2	≥ 85 s.d < 100	Baik
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
5	< 50	Tidak Baik

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka Dinas Perhubungan merumuskan sasaran strategis untuk masing – masing tujuan. Hasil capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perhubungan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

### 1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan di Kabupaten Brebes dengan target 81,50 % realisasi menjadi 102,31 %.

Berdasarkan data laporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diambil dari 100 responden terhadap pelayanan pengujian bermotor diperoleh hasil 83,38 %, sedangkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah 81,50 % dengan realisasi 102,31 % yang di dapat dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibagi target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dikali seratus persen dengan katagori Sangat Baik.

### 2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis : Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan dengan target 0,70 Skor realisasi menjadi 0,52 Skor yang berarti arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

Berdasarkan data laporan vc ratio ruas jalan yang diambil dari ruas jalan Pejagan sampai batas kota Brebes adalah 0,52 skor, sedangkan target vc ratio Tahun 2023 adalah 0,70 skor dengan realisasi 0,52 skor yang di dapat dari Volume Lalu Lintas (smp/jam sibuk) dibagi Kapasitas Ruas Jalan C (smp/jam) dengan katagori Baik

### 3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan target 64,00 % realisasi menjadi 84,07 %.

Berdasarkan data laporan tahunan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Jumlah kendaraan umum yang memiliki ijin laik jalan ada 1.558 unit, sedangkan jumlah kendaraan umum yang ada di Kabupaten Brebes ada 1.853 unit. Hasil 84,07 % di dapat dari Jumlah kendaraan umum yang miliki ijin laik jalan dibagi jumlah kendaraan umum yang ada di Kabupaten Brebes dikali seratus persen dengan katagori Cukup Baik.

#### 4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan dengan target 53,00 % realisasi menjadi 96,89 % .

Berdasarkan data laporan tahunan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota terealisasi 561 unit, sedangkan target Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ada 579 unit. Hasil 96,89 % di dapat dari realisasi dibagi target Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikali seratus persen dengan katagori Baik.

Tabel 5.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI
1	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	81,50 %	102,31 %
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana	2. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan	0,70 Skor	0,52 Skor

	Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan		Ruas Jalan		
		3. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	64,00 %	84,07 %
		4. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	53,00 %	96,89 %

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang masih mengacu pada Renstra Tahun 2017 – 2022, yang hanya memiliki satu sasaran strategis dan satu indikator sasaran strategis dengan target 74 % dan realisasi 84,41 % dari persentase 100 % Kategori Cukup Baik, di Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sudah mengacu pada Renstra Tahun 2023 – 2026, dimana ada empat sasaran strategis dan empat indikator sasaran strategis yang masing-masing indikator memiliki target masing-masing.

Tabel 6.1  
Program/Kegiatan Beserta Sumber Daya Keuangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	9.314.361.793	8.594.473.422	92,27
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1.102.438.701	1.060.012.485	96,15
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	0	0
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.102.438.700	1.060.012.485	96,15
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.151.874.018	5.825.043.489	94,69
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.958.216.000	5.685.666.127	95,43
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	188.658.018	136.643.462	72,43

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	SKPD			
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	2.733.900	54,68
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	549.421.166	393.287.992	71,58
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.845.000	56,90
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.294.000	65.719.000	89,66
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.509.840	56.302.000	68,24
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.339.325	118.630.250	81,62
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	19.893.692	92,10
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.978.001	495.000	9,94
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.700.000	129.403.050	59,72
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	444.496.000	421.000.000	94,71
4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.496.000	421.000.000	94,71
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	707.761.800	595.152.147	84,09
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.207.680	94.380.297	97,09
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.424.000	216.888.169	68,33
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.108.000	39.998.019	86,75
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.022.120	243.885.662	98,73
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	358.370.108	299.977.309	83,71
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	301.794.108	244.481.298	81,01
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi	56.576.000	55.496.011	98,09

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	12.935.704.631	11.632.687.508	89,92
<b>1</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	3.966.505.032	3.812.899.351	96,13
1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	28.000.000	27.350.400	97,68
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.026.887.577	2.887.221.567	95,39
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	229.537.280	223.137.764	97,21
1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	682.080.175	675.189.620	98,99
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	3.288.440.421	3.194.486.098	97,14
2.1	Pembangunan Gedung Terminal	3.177.284.500	3.093.126.098	97,35
2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	111.155.920	101.360.000	91,19
2.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1	0	0
<b>3</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	824.122.491	766.169.725	92,97
3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.280.500	168.596.033	99,60
3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	169.032.500	151.145.392	89,42
3.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	97.500.000	97,50
3.4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0
3.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	220.967.940	216.172.900	97,83
3.6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.983.250	28.414.000	71,06
3.7	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	124.858.300	104.341.400	83,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Berkala Kendaraan Bermotor			
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	2.152.468.600	1.332.575.500	61,91
4.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.107.689.400	1.300.435.500	61,70
4.2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	44.779.200	32.140.000	71,77
<b>5</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	2.531.935.087	2.361.082.934	93,25
5.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	75.493.767	61.546.000	81,52
5.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2.456.441.320	2.299.536.934	93,61
<b>6</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	172.233.000	163.473.900	94,91
6.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.870.700	86.717.900	97,58
6.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	83.362.300	76.756.000	92,08

Anggaran untuk mendukung pencapaian keempat Sasaran Strategis adalah sebesar Rp. 22.250.066.424,- terealisasi sebesar Rp. 20.225.160.930,- atau 90,90% terjadi efisiensi penggunaan anggaran dari pagu yang ditentukan.

Berdasarkan RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan seperti pada Tabel 6.1.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang pensiun lebih banyak dibanding jumlah CPNS yang direkrut;
2. Alokasi anggaran daerah yang terbatas;
3. Tahun 2023 anggaran Dinas Perhubungan dirasionalisasi sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan terbatas.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala :

1. Alternatif perekrutan SDM melalui jalur PPPK dan *Outsourcing*;
2. Pendanaan alternatif dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2023 - 2026, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) Misi, 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran strategis yang diukur dengan masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja, mencapai target 102,31 % atau kategori **“Sangat Baik”**, untuk Indikator kinerja kedua mencapai target dengan skor 0,52 atau kategori **“Baik”**, indikator ketiga mencapai target 84,07 % atau kategori **“Cukup Baik”**, dan indikator kinerja keempat mencapai 96,89 % atau kategori **“Baik”**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Sub Bidang serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 - 2026. Dari data tersebut diatas menunjukkan

bahwa ketercapaian antara Indikator Kinerja Utama, Tujuan dan Sasaran pada tahun 2023.

Pencapaian target kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis 2023 - 2026 untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.250.066.424,- terealisasi sebesar Rp. 20.225.160.930,- atau 90,90 % meliputi Belanja Operasi dan sebesar Rp. 16.160.579.624,- dengan realisasi Rp. 14.305.571.355,- atau 88,52 % dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.089.486.800,- dengan realisasi Rp. 5.919.589.575,- atau 97,21 %.

Brebes, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES



**Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU Lt. 4  
Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211  
Telepon (0283) 671779 Laman: inspektorat.brebeskab.go.id,  
Pos-el:inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700 / 68 / II / 2024  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Reviu LKJiP Dinas Perhubungan  
Kabupaten Brebes Tahun 2023

Brebes, 05 Februari 2024

**Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes  
Di Brebes**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 094/0158/II/2024, kami telah melaksanakan reviu atas LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- LKJiP belum menyajikan :
  - Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan standar nasional/provinsi/regional;
  - Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi hanya mendeskripsikan jenis program, pagu anggaran, target dan realisasi;
- LKJiP telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, namun belum disertai analisis perhitungan yang memadai. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, indikator hasil survei kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan berhasil dicapai 102,31% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,50%. Namun demikian, capaian tersebut belum disertai analisis mengenai hasil capaian serta perhitungan lain yang mendasari nilai capaian tersebut. Demikian juga yang terdapat pada indikator terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dengan realisasi 0,52 dari target 0,7, indikator persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi dengan realisasi 84,07% dari target 64,00%, serta indikator persentase pemenuhan jumlah prasarana jalan dengan realisasi 96,89% dari target 53%.
- Terdapat target kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target IKU pada LKjlp	Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	-	81,50%
Menjaga Tingkat pelayanan ruas jalan	Terjaganya Tingkat pelayanan ruas jalan	-	0,7 (Skor)

Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	-	64,00%
Meningkatnya jumlah ketersediaan prasarana jalan	Persentase pemenuhan jumlah prasarana jalan	-	53,00%

4. Analisis atas penggunaan sumber daya dan efisiensinya belum disertai dengan penjelasan secara rinci. Penyerapan anggaran dari rencana anggaran hanya ditetapkan berdasarkan capaian 4 (empat) sasaran strategis atau terealisasi sebesar Rp20.225.160.930,00 dari pagu sebesar Rp22.250.066.424,00 (90,90%).
5. LKJIP belum menjawab permasalahan utama yang dihadapi organisasi sebagaimana dijelaskan pada Bab II/Perencanaan Kinerja.

Demikian laporan hasil reviu atas LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n Inspektur Daerah Kab. Brebes  
Irbn Khusus



**Akhmad Sodikin, AP., M.Si.**  
**NIP. 19700304 199203 1 005**

Pengendali Teknis

**Adi Susanto, S.T., C.FrA.**  
**NIP. 19760517 200604 1 004**

## JAWABAN HASIL REVIEU INSPEKTORAT

1. a)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI OPD	REALISASI NASIONAL / PROVINSI/ REGIONAL
1	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	102,31%	88,40 % (Nasional Kementerian Perhubungan)
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,52 Skor	0,85 Skor ( Provinsi)
		2. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	84,07 %	
		3. Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	96,89 %	

b)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANALISIS
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.314.361.793	8.594.473.422	92,27	Kegagalan : Kurangnya pagu anggaran karena kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes masih terbatas.
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.935.704.631	11.632.687.508	89,92	Kegagalan : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang Perhubungan

2.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI OPD	KETERANGAN
1	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	102,31 %	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	1. Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,52 Skor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>C_{ruas\ n} = CO \times FC_{w\ x\ FC\ spb} \times FC_{sf}</math>  <math>= 1900 \times 1 \times 1 \times 1.02</math>  <math>= 3876</math>  smp/jam</li> <li>▪ <math>VCR_{ruas\ n} = VCR_{ruas\ n} / C_{ruas\ n}</math>  <math>= 2.013\ smp/jam</math></li> </ul> <hr/> $3.876\ smp/jam$ $= 0,52$ <p>0,52 memiliki tingkat pelayanan C yang berarti arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang dapat di tolelir.</p>
		2. Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	84,07 %	
		3. Meningkatkan Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	96,89 %	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$ $= \frac{561}{579} \times 100\%$ $= 96,89\%$

3. Target kinerja sudah sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023
4. Secara anggaran tercapai 90,90% yang selisihnya merupakan efisiensi karena secara fisik terealisasi 100%.

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024**

**FORMAT PENGISIAN LKPJ TA 2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES**

**A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKD) Pemerintah Daerah  
Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Kinerja Lalu Lintas (0,6 s.d. 0,8)	Skor	0.52	0.70	0.55
2	Kinerja Keselamatan Lalu Lintas	Skor	21.00	19.00	12.00

Dinas Perhubungan memiliki dua Indikator Kinerja Sasaran (IKD), pada indikator kinerja lalu lintas mencapai realisasi skor sebesar 0.55 dari target skor 0.70 sehingga indikator tersebut tercapai, angka tersebut masuk dalam tingkat pelayanan C yaitu masuk dalam zona arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Pada indikator kinerja keselamatan lalu lintas mencapai realisasi skor 12.00 dari target skor 19.00 sehingga mencapai dari target yang ditentukan.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan Indikator Kinerja Keselamatan Lalu Lintas salah satunya adalah perilaku pengemudi kendaraan yang disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak melawan arus, menggunakan helm bagi kendaraan roda dua, menggunakan *seat belt* bagi kendaraan roda empat dan tidak menerobos saat lampu merah. Selain itu penyebab adanya peningkatan yang terjadi pada Tahun ini adalah Infrastruktur yang mulai memadai seperti jalan-jalan yang rusak atau berlubang segera di tindak lanjuti, penyalahgunaan parkir di bahu jalan maupun di trotoar yang dibenahi. Keberhasilan Indikator Kinerja Tahun ini juga dikarenakan terjalinnya sinergitas antar pemangku kepentingan dibidang transportasi antara lain dengan kepolisian, asosiasi pengusaha angkutan dan instansi vertikal.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja ruas jalan, antara lain: lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian akibat hambatan samping, faktor penyesuaian ukuran kota (jumlah penduduk), Kepadatan kendaraan, dan tingkat mobilitas penduduk. Alternative solusi yang dilakukan adalah dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

### Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%) 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	%	102.31	82.00	83.44	101.74
2	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Skor	0.52	0.70	0.55	127.27
3	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	%	84,07	65.00	83.33	128.20
4	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	%	96.89	54.00	44.65	82.69

Dinas Perhubungan memiliki empat Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKU), pada indikator persentase hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mencapai realisasi sebesar 83,44 % dari target 82,00 % sehingga capaian kinerja pada tahun ini adalah 101,74%. Pada indikator terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan mencapai realisasi skor sebesar 0,55 dari target skor 0,70 sehingga indikator tersebut tercapai, angka tersebut masuk dalam tingkat pelayanan C yaitu masuk dalam zona arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Pada indikator persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi mencapai realisasi sebesar 83,33 % dari target 64,00 % sehingga mencapai lebih dari target yang ditentukan dan capaian kinerja pada tahun ini adalah 128%. Indikator terakhir ada pada persentase pemenuhan jumlah prasarana jalan mencapai realisasi sebesar 44,65 % dari target 53,00 % yang artinya kurang dari target yang ditentukan, dengan capaian kinerja 82,69%. Target berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Nomor : 050 / 0122 / 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Permasalahan yang terdapat pada keempat indikator adalah pada Pendaftaran Uji KIR ( proses pengujian kelayakan bermotor) dan Hasil Uji sudah melalui Komputerisasi, sedangkan masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya penggunaan full computeres sehingga sebagian masyarakat meminta bantuan kepada petugas. Kemudian pada pemenuhan jumlah prasarana jalan Kendaraan operasional PJU (penerangan jalan umum) hanya memiliki dua unit, dan keterbatasan SDM juga sangat mempengaruhi jika ada

permintaan yang sangat banyak. Solusi yang sudah dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi cara dan panduan kepada masyarakat yang melakukan uji KIR untuk menggunakan komputer.

### 3. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Indikasi Rencana Program Prioritas  
Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Dinas Perhubungan	%	102.31	82.00	83.425	101,74
2	Laporan Kegiatan Analisis Kinerja Ruas Jalan	Dokumen	6.00	6.00	6.00	100
3	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik	%	97.52	72.00	88.71	123
4	Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan	%	96.89	54.00	44.65	83

Dinas Perhubungan memiliki empat capaian indikator rencana program prioritas instansi, pada indikator kinerja program hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mencapai realisasi 83,425 % dari target 82,00 % sehingga mencapai lebih dari target yang ditentukan. Pada indikator kinerja program laporan kegiatan analisis kinerja ruas jalan mencapai realisasi 6 dokumen dari target 6 dokumen sehingga indikator tersebut tercapai, pada indikator kinerja program persentase pelaksanaan pelayanan angkutan dan pengujian kendaraan bermotor yang baik mencapai realisasi 88,71 % dari target 72 % yang artinya mencapai lebih dari target yang ditentukan. Pada indikator kinerja program persentase ketersediaan prasarana jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mencapai realisasi 44,65 % dari target 54,00 % dimana hasil realisasi tersebut masih kurang dari target yang ditentukan.

### 4. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output Kegiatan	:	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan Evaluasi sebanyak 7 dokumen Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Output Kegiatan	:	Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Outcome Kegiatan	:	Pelaksanaan adminitrasi keuangan berjalan dengan baik
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Output Kegiatan	:	Tersedianya pakaian dinas serta atribut
Outcome Kegiatan	:	Penyediaan pakaian dinas serta atribut untuk kelancaran kinerja
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Fasilitasi Kunjungan Tamu g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output Kegiatan	:	Tersedianya Peralatan dan Prasarana Kantor melalui

		pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dll
Outcome Kegiatan	:	Peningkatan kinerja dan pelayanan
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output Kegiatan	:	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran seperti Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dll
Outcome Kegiatan	:	Kelengkapan dan keancaran adminitrasi perkantoran
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Output Kegiatan	:	Terpeliharanya Barang, Peralatan dan Gedung Kondisi Baik melalui pemeliharaan kendaraan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
Outcome Kegiatan	:	Pemeliharaan barang dan gedung semakin baik

Tujuan Program	:	Meningkatkan pelayanan dan adminitrasi pemerintahan
Dampak Program	:	Peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja instansi
Manfaat Program	:	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, kinerja instansi semakin membaik, tercapainya tujuan visi misi instansi

2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	a.Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	:	a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

		<p>c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</p> <p>d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</p>
	Output Kegiatan	: Tersedianya Perlengkapan Jalan yang baik dan terpelihara, pemasangan dan perbaikan lampu, trafik light, traffic cone, marka jalan, rambu dll
	Outcome Kegiatan	: Perlengkapan jalan membaik sehingga lalu lintas menjadi lancar
b.Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
	Sub Kegiatan	: a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
	Output Kegiatan	: Tersedianya terminal penumpang Tipe C yang baik dan layak
	Outcome Kegiatan	: Peningkatan kualitas sarana dan pengembangan SDM pengelola terminal
c.Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	Sub Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul>
	Output Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia sebanyak 18 unit</li> <li>- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 3 orang</li> <li>- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 1 dokumen</li> <li>- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 12 laporan</li> <li>- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara sebanyak 2 unit</li> <li>- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan</li> </ul>

		<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 12 laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 12 laporan</li> </ul>
Outcome Kegiatan	:	Dokumen dan data Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersedia
d.Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>
Output Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 6 laporan</li> <li>- Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 6 laporan</li> </ul>
Outcome Kegiatan	:	Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersedia
e.Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ</li> <li>b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</li> </ul>
Output Kegiatan	:	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas serta kegiatan pengamanan, dll
Outcome Kegiatan	:	Peningkatan Inspeksi Keselamatan LLAJ tersedia
f.Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</li> </ul>
Output Kegiatan	:	Tersedianya Angkutan Umum dan Jasa Angkutan melalui

		kegiatan Penyediaan Angkutan Umum dan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
	Outcome Kegiatan	: Kebutuhan Angkutan Umum dan Jasa Angkutan terpenuhi

Tujuan Program	:	Terciptanya keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
Dampak Program	:	Tercapainya transportasi yang aman tertib dan lancar serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Manfaat Program	:	Tercapainya indeks kinerja lalu lintas, Tersedianya sarana, prasarana dan perlengkapan jalan

#### 5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan  
Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	INSTANSI	BELANJA		(% )
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Dinas Perhubungan	4.152.000.000	1.407.780.000	33,91

Anggaran dan Realisasi Belanja  
Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	URUSAN	BELANJA		(% )
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Operasi	15.383.873.110	14.197.271.890	92,29
	Belanja Modal	4.228.828.610	4.107.119.110	97,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.612.701.720</b>	<b>18.304.391.000</b>	<b>93,33</b>

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Instansi Dinas Perhubungan T.A 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	12.637.588.420	11.552.101.486	91
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	23.261.200	20.109.320	86
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.261.200	20.109.320	86,45
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.751.779.000	6.002.802.205	89
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.590.899.000	5.851.442.905	88,78

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	ASN			
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.880.000	146.770.000	94,16
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.589.300	91,79
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	197.405.100	195.460.000	99,01
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	197.405.100	195.460.000	99,01
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	519.912.400	464.182.563	89
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.715.000	74,30
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.952.100	66.676.500	91,40
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.101.000	63.965.000	87,50
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.950.200	97.858.350	97,91
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	20.003.602	92,61
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	1.005.000	20,43
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.389.100	210.959.111	87,03
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4.834.640.570	4.578.536.143	95
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.330	10.870.000	98,82
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.174.000	228.696.408	83,72
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.800.000	29.395.000	95,44
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.519.666.240	4.309.574.735	95,35
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	310.590.150	291.011.255	94
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.710.150	239.281.567	93,58
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.880.000	51.729.688	94,26
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	6.975.113.300	6.752.289.514	97,00
<b>1</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan</b>	5.401.334.000	5.259.998.961	97,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	<b>di Jalan Kabupaten/Kota</b>			
1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	109.800.000	109.196.109	99,45
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.085.934.000	3.958.326.887	96,88
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	20.000.000	19.566.525	97,83
1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.185.600.000	1.172.909.440	98,93
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	200.000.000	196.352.401	98,18
2.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	200.000.000	196.352.401	98,18
<b>3</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	409.491.500	399.956.310	98,00
3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	42.656.000	39.264.991	92,05
3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	100,00
3.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	256.835.500	250.691.319	97,61
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	714.990.890	663.701.542	93,00
4.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	33.041.000	29.290.000	88,65
4.2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	681.949.890	634.411.542	93,03
<b>5</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	132.580.410	119.204.300	90,00
5.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.250.000	10.697.300	95,09
5.2	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	121.330.410	108.507.000	89,43
<b>6</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	116.716.500	113.076.000	97
6.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	8.763.500	7.751.500	88,45

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
6.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.953.000	105.324.500	97,57
	<b>TOTAL</b>	<b>19.612.701.720</b>	<b>18.304.391.000</b>	<b>93,33</b>

**6. Penghargaan yang didapat di tahun 2024 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)**

a. Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 Tingkat Nasional

Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penilaian dilakukan atas katagori kota metropolitan Kota besar, Kota Sedang, dan Kota kecil. Kabupaten Brebes sendiri dikategorikan sebagai Kota Kecil yang mampu menata transportasi publik dengan baik.

b. Penilaian Pemingkatan Badan Publik Kategori cukup informatif Tahun 2024 Tingkat Kabupaten

Penilaian Pemingkatan Badan Publik yang berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

**B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Dinas Perhubungan	82%	83,425%		
1				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen		
1.1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1 Dokumen	1 Dokumen		
2				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	6 Jam/Hari	6 Jam/Hari		
2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ( orang/bulan )	57 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan		
2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen		

					Keuangan SKPD ( dokumen )				
2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
<b>3</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)</b>	77 %	77		
3.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	300 paket	260		
<b>4</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Administrasi Umum Dengan Baik	83 %	83 %		
4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5 Paket	5 Paket		
4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5 Paket	5 Paket		
4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	5 Paket	5 Paket		
4.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	5 Paket	5 Paket		

					Penggandaan yang Disediakan (paket)				
4.5				Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen		
4.6				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
4.7				Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	1 Laporan		
<b>5</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kondisi Baik	82 %	82 %		
5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	12 Laporan		
5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan		
5.3				Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan		
5.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12 Laporan		

					Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)				
<b>6</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik	82 %	82 %		
6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	46 Unit	8 Unit		
6.2				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3 Unit	1 Unit		
<b>II</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Analisis Kinerja Ruas Jalan</li> <li>2. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Baik</li> <li>3. Persentase Ketersediaan</li> </ol>	6 Dokumen,	6 Dokumen,		

					Prasarana Jalan	53 %	44,65 %		
<b>1</b>				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	53 %	44,65 %		
1.1				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	15	38		
1.2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1537	655		
1.3				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7	7		
1.4				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1044	1044		
<b>2</b>				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Terselenggaranya Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	12 Bulan	12 Bulan		
2.1				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (unit)	1 Unit	1 Unit		
<b>3</b>				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU yang Melaksanakan Uji)	5000 Unit	8252 Unit		
3.1				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	3		

					yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)				
3.2				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (dokumen)	2	1		
3.3				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (unit)	20	2		
<b>4</b>				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Laporan Kegiatan Monitoring dan Supervisi Lalu Lintas	12 Dokumem	12 Dokumem		
4.1				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (laporan)	6 Laporan	6 Laporan		
4.2				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)	6 Laporan	6 Laporan		
<b>5</b>				<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	6 Dokumen	6 Dokumen		
5.1				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	1. Jumlah Auditor dan Inspektor	2,6,6	2,6,6		

					<p>LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)</p> <p>2. Laporan Survey penataan penggunaan ruang milik jalan (dokumen)</p> <p>3. Laporan Survey Identifikasi Anatomi Lalu Lintas (dokumen)</p>				
5.2				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	<p>1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</p> <p>2. Laporan Survey Identifikasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan</p> <p>3. Laporan Survey Operasional Angkutan Penumpang dan Barang</p>	12 Laporan, 6 Dokumen, 6 Dokumen	12 Laporan, 6 Dokumen, 6 Dokumen		
6				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah</b>	Rasio Angkutan Pedesaan yang Berkeselamatan Bersih dan Nyaman Tepat	33 %	33 %		

				Kabupaten/Kota	Waktu				
6.1				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	44 Unit	178 Unit		
6.2				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		

Brebes, 16 Januari 2025

 KEDAI BINA PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES

  
**Drs. BUDI DARMAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680210 198803 1 004